

# **PROFIL**

## **PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)**

### **ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KOTA SURABAYA**  
**TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya dengan rasa hormat yang mendalam, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyusun dokumen Profil Perangkat Daerah Responsif Gender sesuai 3 Komponen PUG (Pengarutamaan Gender). Profil ini disusun sebagai bagian dari upaya kami untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender di tingkat lingkungan Perangkat Daerah mendukung terwujudnya Perangkat Daerah Responsif Gender mewujudkan Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak Se-Kota Surabaya.

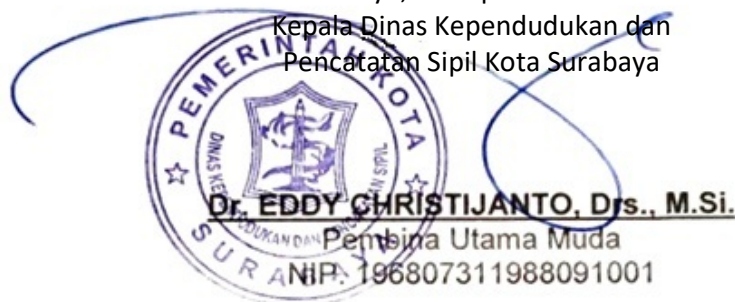
Pendekatan responsif gender bukanlah sekedar sebuah konsep, tetapi sebuah komitmen nyata untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat peran strategis perempuan dan anak-anak dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang upaya yang telah kami lakukan dalam menjadikan lingkungan Perangkat Daerah kami lebih ramah terhadap perempuan dan lebih peduli terhadap anak-anak. Kami berharap profil ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih responsif gender di masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga upaya bersama ini dapat membawa manfaat yang nyata bagi seluruh lapisan Masyarakat tanpa diskriminasi dan Perangkat Daerah.

Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam dokumen ini. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Surabaya, 04 September 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kota Surabaya



**Dr. EDDY CHRISTIJANTO, Drs., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196807311988091001

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
BAB II    PROFIL PERANGKAT DAERAH DAN PELEMBAGAAN PUG .....	x
BAB III    PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI PERANGKAT DAERAH .....	xx
BAB IV    TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PUG DAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER KOTA SURABAYA .....	xx
BAB V    INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (GENDER EQUALITY DISABILITAS & SOSIAL INKLUSI), PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA .....	xx
BAB VI    PENUTUP .....	xx
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Responsivitas gender adalah elemen kunci dalam upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan pengintegrasian kebutuhan, aspirasi, dan pengalaman baik perempuan maupun laki-laki dalam setiap aspek kebijakan dan program. Pendekatan responsif gender diakui sebagai cara yang efektif untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya diikutsertakan dalam pembangunan, tetapi juga memiliki peran yang signifikan serta mendapatkan manfaat yang sama dengan laki-laki.

Dengan memperhatikan responsivitas gender, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan yang ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak. Ini berarti mengakui bahwa perempuan memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam pembangunan, dan oleh karena itu, mereka harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses tersebut.

Selain itu, pendekatan responsif gender juga penting untuk memastikan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dengan cara ini, responsivitas gender bukan hanya tentang memperhitungkan kebutuhan perempuan, tetapi juga tentang memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dipenuhi sepenuhnya. Dengan demikian, pengarusutamaan gender bukan hanya merupakan sebuah kebijakan, tetapi juga sebuah komitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

### **1.2 Dasar Hukum Penyelenggaraan**

- a. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
- b. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1499);

- c. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penetapan Kabupaten/Kota wilayah Model Desa/Perangkat Daerah Ramah Perempuan dan peduli Anak
- d. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
- e. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
- f. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender
- g. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 77).
- h. Permen PPPA Nomor 2/2017 Pasal 13 dan 14, tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan PPPA.
- i. Pembentukan Forum PUSPA Srikandi Kota Surabaya berdasar pada Keputusan Walikota Surabaya Nomor 100.3.3.3/208/436.1.2/2023.

- j. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 100.3.3.3/57/436.1.2/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya
- k. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 100.3.3.3/4/436.1.2/2024 Tentang Penetapan model Daerah ramah perempuan dan peduli anak Kota Surabaya Tahun 2024 Surabaya.

### **1.3 Tujuan Penyusunan Profil PUG**

Pelaksanaan Perangkat Daerah Responsif Gender Sinergi dengan Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan untuk mendorong percepatan terwujudnya Perangkat Daerah Responsif Gender yang mendukung Kota Surabaya sebagai Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak dari KEMENPPPA serta memahami strategi percepatan PUG (Pengarusutamaan Gender) melalui revitalisasi 3 komponen PUG (Pelebagaan, Penyelenggaraan dan Inovasi);
- b. Mewujudkan Perangkat Daerah Responsif Gender sebagai model yang baik (*good practise*) dalam mewujudkan keadilan Gender, Disabilitas dan inklusi sosial GEDSI (Gender Equality Disability and Social Inclusion) mendukung Kota Surabaya sebagai Daerah ramah Perempuan dan layak anak tanpa diskriminasi;
- c. Melaksanakan evaluasi strategi percepatan PUG di Perangkat Daerah beserta wilayah kerjanya apakah sudah sesuai 3 komponen PUG Tahun 2025;
- d. Sebagai Program Inovasi Pembangunan Responsif Gender Kota Surabaya Tahun 2025;

## **BAB II**

### **PROFIL PERANGKAT DAERAH DAN PELEMBAGAAN PUG**

#### **2.1 Gambaran Umum**

##### **Sejarah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya**

Pemerintah Kota Surabaya merupakan pusat pemerintahan Kota Surabaya yang didalamnya terdapat berbagai instansi dan dinas yang menangani kebutuhan untuk Kota Surabaya. Salah satunya yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menangani di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kota Surabaya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya atau biasa disingkat dengan Dispendukcapil Kota Surabaya merupakan dinas yang bergerak di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dispendukcapil berlokasi di Gedung Siola lantai 1 dan 3, Jalan Tunjungan No. 1-3 Surabaya berada satu gedung dengan OPD lain diantaranya Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Dalam menangani permasalahan kependudukan dan pencatatan sipil, Dispendukcapil memiliki 5 (lima) bidang tugas yang sesuai dengan tugas dan pokok fungsinya. Bidang-bidang tersebut diantaranya bidang Sekretariat, bidang Pemanfaatan Data dan Informasi Penduduk (PDIP), bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), bidang Pelayanan Pencatatan Sipil (Capil) dan bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Dafduk). Dispendukcapil beroperasi saat jam kerja hari Senin-Sabtu.

#### **2.2 Visi, Misi dan Motto**

##### **a. Visi**

Terwujudnya Data Penduduk yang Akurat serta Masyarakat yang Sadar dan Tertib Administrasi Kependudukan.

##### **b. Misi**

Memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Prima, Dinamis, dan Humanis.

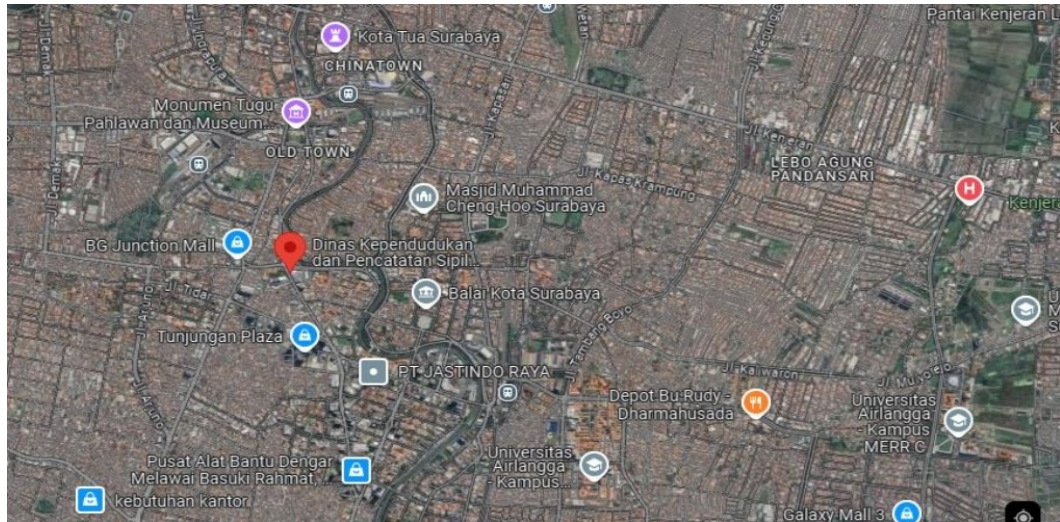
##### **c. Motto**

Humanis Berintegritas

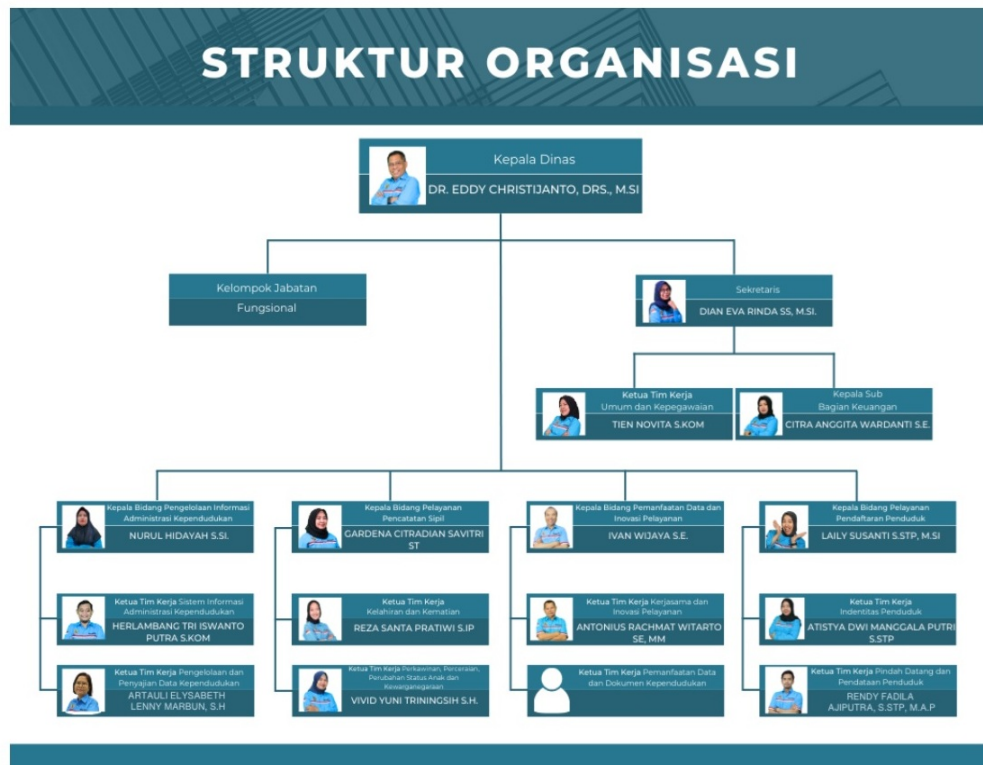
## 2.3 Demografi

### a. Keterangan Lokasi dan batas wilayah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya (Disdukcapil) berlokasi pada Jalan Tunjungan No. 1-3, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. Tepatnya terletak di dalam Gedung Siola lantai 1 dan lantai 3.



### b. Struktur Organisasi





## **2.4 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender**

### **2.4.1 Kebijakan**

Dalam rangka mewujudkan Visi Walikota Surabaya "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong", dengan Misi 4 (empat) "Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik" dan upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di setiap OPD diperlukan strategi perencanaan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan OPD. Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertuang pada

- a. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 100/3.3.3/57/436.1.2/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Surabaya.
- b. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Nomor 188.45/13530/436.7.11/2023 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Tahun 2024.

Adapun dokumen pendukung terdapat pada link berikut. [SK FOCAL POINT.](#)

### **2.4.2 Sosialisasi PUG**

Dalam rangka optimalisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dilakukan sosialisasi sebagai berikut:

1. Senin, 06 Januari 2025, Review PUG dan Desk ARG untuk Laporan PPRG Tahun 2025
2. Senin, 21 April 2025, Pertemuan Pokja dan Internalisasi PUG (Pengarusutamaan Gender) Perangkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 di Ruang Majapahit Lt. III Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya.
3. Rabu, 30 Juli 2025, Pertemuan Pokja PUG Semester II (Review Kebijakan dan Data Terpilah PUG) Kota Surabaya Tahun 2025 melalui zoom meeting
4. Senin, 01 September 2025, Pemenuhan Database PUG Kota Surabaya Tahun 2024 dan 2025.

5. Senin, 07 September 2025, Review Aplikasi SIGAS Update, Juknis Pemenuhan Database PUG dan LKE PPE Kota Surabaya Tahun 2025 melali zoom meeting

Adapun dokumen pendukung terdapat pada link berikut. [DOKUMEN PENDUKUNG SOSIALISASI PUG](#)

### 2.4.3 SDM Terlatih PUG

#### 1. SDM Perencana dan Penganggaran Terlatih

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Tien Novita,S.Kom	Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian	Sertifikat Pelatihan
2.	Nurul Hidayah,S.Si	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sertifikat Pelatihan
3.	Suliyatiningsih	Staf Sekretariat	Sertifikat Pelatihan

Jumlah SDM Perencanaan dan Penganggaran Terlatih PUG	Jumlah SDM Dispendukcapil Siola	%
3	150	2%

#### 2. Focal Point PUG

Sesuai Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Nomor 188.45/13530/436.7.11/2023 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Tahun 2025

Focal Point Dispendukcapil	Keterangan
13	Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian, Staf Sekretariat, Staf Pelayanan Pencatatan Sipil, Staf Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dan Staf Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

### 2.4.4 Data Terpilah dan sistem publikasinya

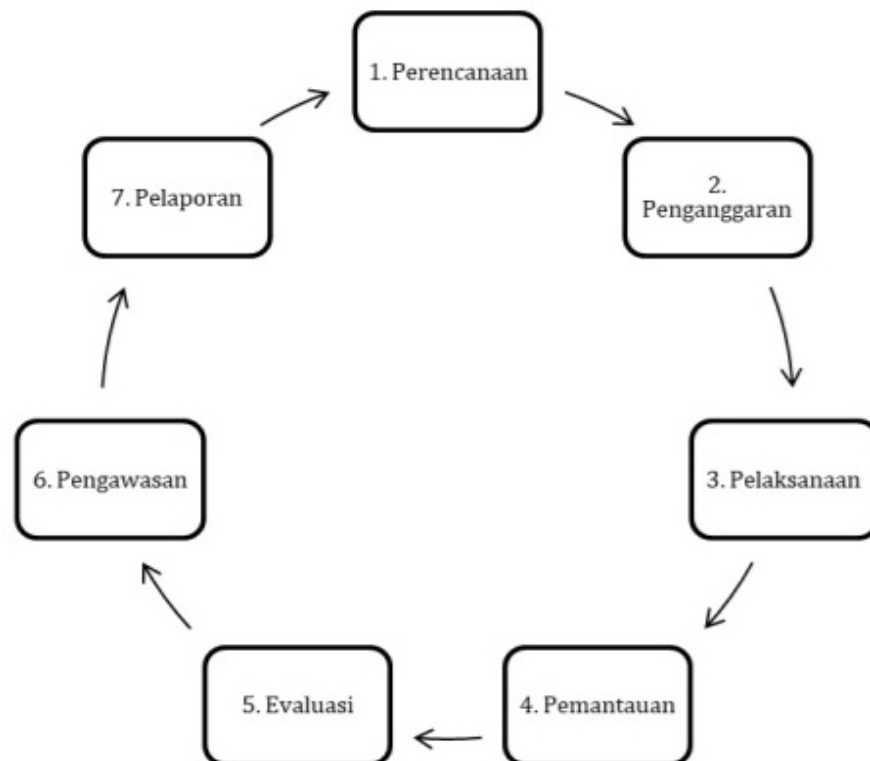
Sesuaikan template dan boleh dilengkapi Format Data terpilah @PD

[https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17XTpnOZw5Q8o7F\\_ML3dok49a5dpfiWT2](https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17XTpnOZw5Q8o7F_ML3dok49a5dpfiWT2)

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah Responsif Gender (KRG) Sinergi Perangkat Daerah Ramah Perempuan dan Anak dapat diwujudkan secara berkelanjutan melalui proses sebagai berikut:



##### 3.1 Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan, untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. PPRG bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Penyusunan PPRG bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisi untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. Perencanaan

dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan dua proses yang saling terkait dan terintegrasi. Berikut beberapa konsep tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG):

### **1. Perencanaan yang Responsif Gender**

Perencanaan yang responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program atau pun kegiatan yang dilaksanakan dimasa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya.

#### **a. Regulasi/kebijakan yang mengatur tentang Perencanaan PUG**

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Nomor. 188.45/13530/436.7.11/2023 tentang Tim Focal Point Pengarasutamaan Gender (PUG) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana dapat diakses pada link berikut [SK PUG](#)

#### **b. Renstra dan renja Perangkat Daerah untuk yang Responsif Gender**

Renstra dan renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana dapat diakses pada link berikut [RENSTRA DAN RENJA DISDUKCAPIL](#)

#### **c. Dokumen Perencanaan penganggaran Responsif Gender (GAP,GBS,TOR)**

Program / kegiatan / sub kegiatan yang memberi manfaat sama bagi laki-laki dan perempuan ada 4 (empat) sub kegiatan sebagaimana dapat diakses pada link berikut [GAP, GAB TAHUN 2025](#)

#### **d. Hasil Analisis Gender**

Hasil analisis gender terdapat dalam dokumen yang berbentuk dokumen GAP (*Gender Analysis Pathway*) dan GBS (*Gender Budget Statement*) dengan 9 (sembilan) sub kegiatan tahun 2025.

#### **e. Alat analisis gender**

Alat dan teknik analisis gender yang digunakan adalah model *Gender Analysis Pathway* (GAP). Komponen utama analisis model GAP menggunakan 9 (sembilan) langkah yaitu :

1. Memilih kebijakan / program / kegiatan.

2. Menyajikan data pembuka wawasan terpilah menurut jenis kelamin, baik kuantitatif maupun kualitatif.
3. Mengenal isu kesenjangan gender.
4. Menemu kenali isu kesenjangan gender (internal).
5. Menemu kenali isu kesenjangan gender (eksternal).
6. Merumuskan kembali tujuan kebijakan / program / kegiatan.
7. Menyusun rencana aksi.
8. Tetapkan *baseline* (data dasar).
9. Indikator gender.

## **2. Penganggaran yang Responsif Gender**

Penyusunan anggaran yang responsif gender guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan dengan mendorong kesetaraan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari anggaran. Penganggaran yang responsif gender tidak memisahkan anggaran untuk perempuan dan laki-laki; bukan untuk dasar menambah alokasi anggaran; dan bukan berarti penambahan anggaran khusus untuk perempuan

- a. Anggaran yang responsif gender memperhatikan kebutuhan, permasalahan, aspirasi, pengalaman perempuan dan laki-laki, serta memberi manfaat yang adil kepada perempuan dan laki-laki.
- b. Kebijakan tentang penganggaran PUG didasarkan pada pencapaian Visi Misi Kota Surabaya yang sama dengan :
  1. RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026
  2. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
  3. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
  4. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Nomor. 188.45/13530/436.7.11/2023 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
  5. GAP dan GAB

Adapun dokumen pendukungnya terdapat pada link berikut [GAP, GAB 2025](#)

Anggaran Responsif Gender (GAP dan GAB) di Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Surabaya tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel**  
**Anggaran Responsif Gender**

<b>No</b>	<b>Nama Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
1	Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp 1.945.131.328
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Rp 648.979.087
3	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp 2.388.297.550
4	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Rp 941.974.142
5	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Rp 506.324.333
6	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Rp 292.739.607
7	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Rp 118.497.024
8	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 1.583.640.180
9	Pengolah dan Penyajian Data Kependudukan	Rp 834.790.582
	<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp 9.260.373.833</b>

### 3.2 Pelaksanaan (Penjelasan sudah ada pada Juknis sblmnya)

#### a. Output yang mendukung pemberdayaan Perempuan (Politik,Ekonomi,Sosial termasuk Hukum dan lainnya)

<b>No.</b>	<b>Bidang</b>	<b>Kegiatan</b>
1.	Politik	Wawasan terkait pentingnya administrasi kependudukan
2.	Ekonomi	Meningkatkan Kemudahan Pembayaran (Katepay) yang Bekerjasama dengan Bank Jatim bagi anak-anak yang masih bersekolah.
3.	Sosial	Meningkatkan masyarakat tertib administrasi kependudukan baik laki-laki maupun perempuan
4.	Hukum	Sosialisasi terkait Peraturan Administrasi Kependudukan bagi Laki-Laki maupun Perempuan.
5.	Lainnya	Berkontribusi dalam kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak.

**b. Ketersediaan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan**

Ketersediaan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya adalah dharma wanita untuk memberikan pelatihan dalam rangka pemberdayaan perempuan.

**c. Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan di Internal PD dan Jejaring**

Upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan memberikan pengarahannya di lingkungan internal dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya dalam bermasyarakat.

**d. Ketersediaan layanan bagi Perempuan dan anak di Internal PD dan Jejaring**

Ketersediaan layanan bagi perempuan dan anak yang ramah yaitu tersedianya ruang laktasi dan *play ground* di lantai 1 Gedung Siola dekat dengan tempat pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.

**e. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender**

Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya diakomodir dengan kegiatan pelatihan Dharma Wanita yang memberikan wawasan dan ketrampilan untuk meningkatkan kualitas keluarga.

**f. Ketersediaan Lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga**

Bentuk ketersediaan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dengan bergabung pada kegiatan dharma wanita yang dapat menjadi wadah aspirasi sehingga mampu menyalurkan dampak positif dalam bermasyarakat.

**g. Ketersediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya mensosialisasikan dan melakukan kegiatan jemput bola administrasi kependudukan bagi laki-laki maupun perempuan.

**h. Program pembangunan berbasis kewilayahan yang mengintegrasikan perspektif gender**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya berusaha memberikan lingkungan yang ramah bagi perempuan dan anak pada tempat layanan adminduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.

**i. Data angka kasus kekerasan terhadap perempuan di Internal PD dan jejaring**

Sampai saat ini, tidak ada kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat di internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.

**j. Ketersediaan sarana dan prasarana yang responsif gender (Bukti Dukung & Penjelasan)**

No.	Jenis Sarana	Ada / Tidak, Jumlah	Kondisi
1.	Kantor Dispendukcapil	Ada , 1	Baik
2.	Toilet Laki-Laki dan Perempuan	Ada	Baik
3.	Ruang Laktasi dan Playground	Ada	Baik
4.	Sarana Prasarana Penunjang (APAR, Tempat Sampah, Keterangan Titik Kumpul / Jalur Evakuasi)	Ada	Baik
5.	Tempat Wudhu Laki-Laki dan Perempuan	Ada	Baik

**k. Pembinaan PUG Perangkat Daerah kepada Internal PD dan jejaring**

Pembinaan pengarusutamaan gender (PUG) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya diimplementasikan dengan penyusunan dokumen penganggaran responsif gender seperti GAP dan GAB.

### **3.3 Pemantauan dan Evaluasi**

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Nomor 188.45/13530/436.7.11/2023 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tahun 2023.

### **3.4 Pengawasan**

Pengawasan pelaksanaan PUG Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya melibatkan unsur internal dan eksternal perangkat daerah. Hal ini bertujuan untuk melakukan pengawasann atas pelaksanaan PUG dengan memperhatikan arahan dari APIP atau inspektorat.



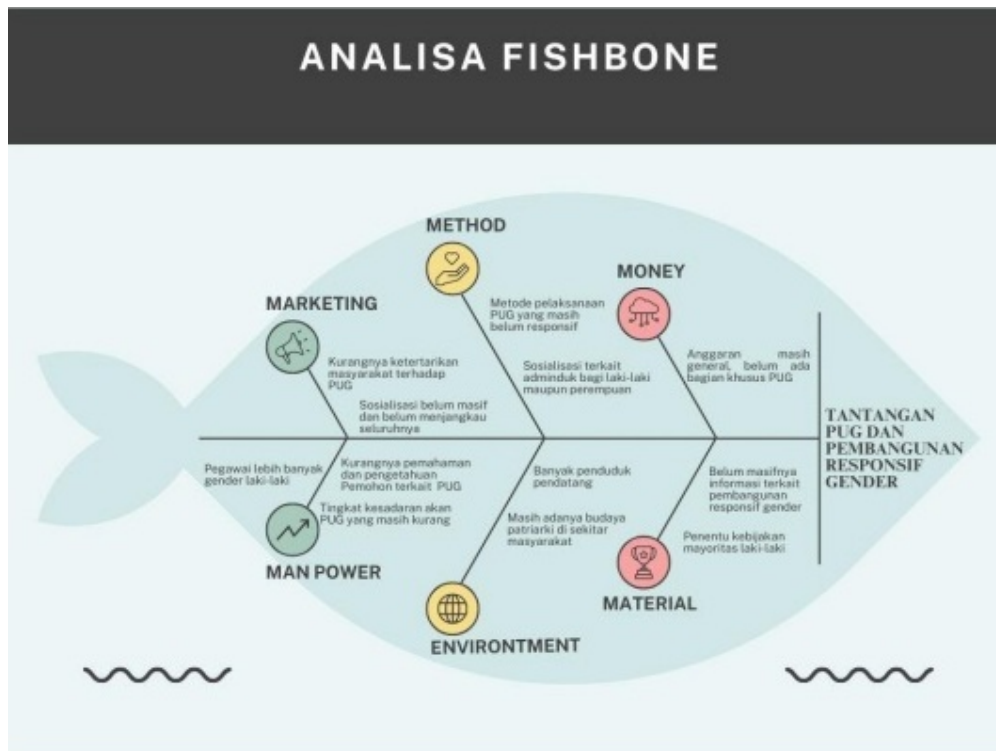
### **3.5 Pelaporan**

Pelaporan Pengarasutamaan Gender (PUG) mengacu pada Surat Keputusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Nomor 188.45/13530/436.7.11/2023 tentang Tim Focal Point Pengarasutamaan Gender (PUG) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Pelaporan Pengarasutamaan Gender (PUG) diimplementasikan dalam bentuk Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang terdiri atas GAP dan GAB beserta Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.

## BAB IV

### TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PUG DAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER KOTA SURABAYA

#### 4.1 Analisa (Fish Bone, Man, Material, Metode dsb)



#### 4.2 Kesimpulan

- Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat akan tertibnya administrasi kependudukan.
- Perlunya mulai menggerakkan generasi muda untuk melakukan perubahan terhadap pembangunan responsif gender.
- Perlunya lebih masif memberikan informasi tentang pengarusutamaan gender di media cetak maupun media sosial yang mudah diakses seluruh masyarakat.

#### **4.3 Tatalaksana Masalah Yang Sudah Dilaksanakan Dan Rekomendasi/Saran**

##### **a. Yang sudah dilaksanakan**

- Sosialisasi administrasi kependudukan melalui media sosial yang mudah diakses masyarakat dan kegiatan “Disdukcapil Belajar” yang dilaksanakan setiap hari Kamis oleh seluruh staf baik laki-laki maupun perempuan di lingkungan Dispendukcapil untuk mengoptimalkan tertib administrasi kependudukan.
- Melakukan kegiatan jemput bola administrasi kependudukan bagi semua kalangan masyarakat.

##### **b. Rekomendasi atau Saran**

- Pengoptimalan melakukan pelatihan tanpa membedakan gender di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
- Membangun jaringan sosialisasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan berbagai *stakeholder* dan melibatkan masyarakat.

## BAB V

### INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (GENDER EQUALITY DISABILITAS & SOSIAL INKLUSI), PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

#### 5.1 Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan

Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan di Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Surabaya yang berbasis Gender (GEDSI), Issue Gender Kota Surabaya antara lain:

No.	Program Inovasi	Deskripsi	Dampak yang Diharapkan
1.	Puntadewa (himpun data demografi kawasan)	Aplikasi ini digunakan untuk mendata penduduk Non permanen yang tinggal di surabaya	Sudahterakumulasi data warga non permanen dalam aplikasi punta dewa yang sesuai <i>defacto</i> dan <i>dejure</i> kondisi di masyarakat.
2.	Jebol anduk (jemput bola administrasi kependudukan)	Pelayanan perekaman KTP-el yang mendatangi rumah warga atau sekolah yang mendekati lokasi warga	Bagi penduduk kota surabaya yang berusia lansia dan difabel sudah memiliki kemudahan untuk melakukan administrasi kependudukan dengan cara dilakukan jemput bola menuju lokasi tempat tinggal masing masing warga tersebut.
3.	Contact center "Takondukcapil" (media dan layanan pengaduan administrasi kependudukan)	Contact Center Takon Dukcapil merupakan sebuah sistem informasi untuk membantu dan meningkatkan layanan masyarakat dalam pelayanan publik seperti media Call Center, email, dan Sosial media (wargaku, IG dan telepon) sesuai yang dibutuhkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.	Segala bentuk keluhan atau masukan yang dialami oleh warga surabaya dapat disalurkan melalui inovasi ini. Dengan adanya Contact Center maka segala bentuk keluhan dapat terpantau untuk proses penanganannya dan pemberian solusinya. sehingga warga mendapatkan jawaban sesuai peraturan yang berlaku

No.	Program Inovasi	Deskripsi	Dampak yang Diharapkan
4.	Takon klampid	Aplikasi yang digunakan untuk mengetahui status dari dokumen yang sedang diajukan oleh Pemohon sekaligus informasi tentang kepengurusan kependudukan dan pengecekan status pembayaran denda	Petugas pendistribusi KTP/KIA telah memiliki database dari jumlah KTP/KIA yang siap distribusi sehingga meminimalisir terjadinya selisih antara KTP/KIA yang di distribusi dan yang telah tercetak
5.	Lontong balap (layanan online dan terpadu melalui one gate system bersama disdukcapil dan Pengadilan Negeri Surabaya)	Aplikasi Layanan online dan Terpadu melalui One Gate System Bersama Disdukcapil dan Pengadilan Negeri Surabaya	Warga tidak perlu lagi untuk mobilisasi antara Pengadilan Negeri dan Kantor Disdukcapil untuk menguruskan pengajuan administrasi kependudukan
6.	Pembayaran denda administrasi kependudukan menggunakan virtual account	Kerjasama Disdukcapil dengan Bank Jatim untuk pembayaran Virtual Account denda administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan Klampid (Sistem Layanan Kependudukan)	Petugas keuangan telah dimudahkan dengan adanya inovasi administrasi denda ini sehingga dapat dengan akurat diketahui kitir mana yang sedang memiliki tanggungan denda tersebut
7.	Ketan kolak (kegiatan pencatatan perkawinan secara online administrasi kependudukan)	Pencatatan perkawinan secara online dimana mempelai bisa dimana saja dengan gadget yang terhubung internet. Tanda Tangan Register Pencatatan Perkawinan secara Online dimana mempelai bisa dimana saja dengan gadget yang terhubung internet.	Para calon pengantin tidak diperlukan lagi untuk bertemu tatap muka secara langsung terlebih untuk calon pengantin yang memiliki halangan. Karena untuk proses verifikasi data untuk saat ini dapat dilakukan secara daring melalui platform Zoom Meeting. Tentunya dengan adanya alternatif ini dapat memangkas biaya dan menghemat waktu baik dari sisi petugas maupun sisi calon pengantin

No.	Program Inovasi	Deskripsi	Dampak yang Diharapkan
8.	Lontong kupang (layanan online terpadu melalui one gate system antara disdukcapil surabaya, Pengadilan Agama, dan Kementerian Agama)	Aplikasi Layanan online dan Terpadu melalui One Gate System Antara Disdukcapil, Pengadilan Agama, dan Kementerian Agama yang melayani Permohonan Isbat Nikah dan/atau Asal-usul Anak.	Untuk pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan siri dapat mengikuti inovasi ini untuk segera mendapatkan dokumen pendudukan akta nikahnya tanpa perlu mobilisasi dari pengadilan negeri kemudian berpindah ke kantor Disdukcapil.
9.	Kalimasada (kawasan lingkungan masyarakat sadar adminduk)	Merupakan salah satu program Disdukcapil Kota Surabaya dalam merintis terciptanya lingkungan/kampung yang tertib Adminduk dengan meningkatkan jumlah masyarakat yang sadar Adminduk.	Warga yang hendak melakukan pengurusan adminduk tidak perlu lagi untuk terikat oleh jam kerja kantor kelurahan atau kecamatan karena dengan adanya inovasi ini maka warga dapat melakukan pengurusan adminduknya di rumah Pak RT setempat
10.	Swargaloka (suara warga mengelola kebutuhan adminduk)	Media komunikasi dan informasi terkait layanan adminduk	Warga tidak perlu bingung untuk mendapatkan segala informasi mengenai Disdukcapil maupun perihal administrasi kependudukan seperti contohnya adalah persyaratan yang diperlukan karena semuanya dapat disalurkan melalui media informasi Swargaloka
11.	Lontong kiki (layanan online terpadu one gate system dengan puskesmas, bidan mandiri dan rumah sakit, sekolah)	Pelayanan adminduk yang dapat dilayani oleh Rumah Sakit, Bidan Mandiri, Puskesmas, Sekolah	warga yang telah melakukan kelahirannya di rumah sakit ataupun puskesmas dan bidan, tidak perlu menunggu pulih untuk melakukan pengurusan adminduknya karena untuk dokumen adminduknya dapat diuruskan jadi satu oleh pihak rumah sakit yang telah bekerja sama dengan Disdukcapil Kota Surabaya

No.	Program Inovasi	Deskripsi	Dampak yang Diharapkan
12.	Klampid New Generation (KNG)	Aplikasi berbasis website yang bertujuan untuk menyediakan layanan administrasi kependudukan yang terintegrasi	Warga yang hendak melakukan pengurusan adminduk tidak perlu lagi untuk terikat oleh jam kerja kantor kelurahan atau kecamatan karena dengan adanya inovasi ini maka warga dapat melakukan pengurusan adminduknya di rumah masing masing menggunakan user KNG masing masing warga
13.	Katepay	Aplikasi mobile untuk pendaftaran pembayaran, melakukan isi ulang, melihat saldo, dan melakukan pembayaran menggunakan kartu identitas penduduk termasuk Kartu Identitas Anak (KIA)	Dengan adanya katepay maka pengeluaran uang jajan dari anak sekolah dapat terkontrol dan memberikan edukasi digital terhadap keuangan di lingkungan kantin sekolah
14.	Sosialisasi public campaign	Pemberian kompensasi bila pelayanan mengalami keterlambatan	Warga dapat merasakan dan melihat secara langsung bahwa Disdukcapil telah berkomitmen untuk melayani warga sesuai dengan SOP yang berlaku.
15.	Outreach lapangan	Pemeriksaan kondisi lapangan terhadap permohonan masuk kependudukan yaitu layanan kepindahan penduduk dan buka blokir	Permohonan adminduk tentang Pindah Datang dapat tepat sasaran karena dengan adanya Outreach lapangan maka warga yang pindah dapat dipastikan sesuai dengan kondisi riil di lapangannya
16.	Pahe ( Akta kelahiran + KK dan akta kematian + KK )	Kepengurusan akta kelahiran yang sekaligus mendapatkan dokumen Kartu Keluarga yang terbaru dan akta kematian yang sekaligus mendapatkan dokumen Kartu Keluarga.	Warga dapat menerima beberapa dokumen adminduk hanya dengan 1 kali pengajuan administrasi
17.	Pelayanan selesai 1 x 24 jam	Beberapa layanan yang diajukan oleh warga dan dapat terselesaikan dalam 1 x 24 jam oleh petugas	Warga dapat mendapatkan dokumen adminduk dengan lebih efisien dan dalam waktu yang relatif lebih singkat.

No.	Program Inovasi	Deskripsi	Dampak yang Diharapkan
18.	Pengaduan ditindaklanjuti 1 x 24 jam	Pengaduan yang diajukan oleh warga dan dapat ditindaklanjuti dalam 1 x 24 jam	Warga dapat mendapatkan dokumen adminduk dengan lebih efisien dan dalam waktu yang relatif lebih singkat.
19.	Pengusulan akun KNG petugas kelurahan melalui aplikasi kalimasada	Petugas kelurahan dapat dengan mudah mengajukan akun petugas baru melalui website kalimasada	Petugas kelurahan dapat dengan mudah untuk melakukan pengajuan akun untuk petugas baru melalui aplikasi Kalimasada
20.	Nasi ikan (layanan integrasi data pendidikan dan kependudukan)	Inovasi terbaru dari Disdukcapil Surabaya bekerjasama dengan Dispendik Surabaya terkait pemutakhiran biodata jenjang pendidikan serta pekerjaan yang ada di Kartu Keluarga (KK).	Mempermudah masyarakat dalam hal lamaran kerja, membantu pemerintah kota dalam hal menentukan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dan mempengaruhi indeks pembangunan manusia.

#### Lampiran

1. SK PUG Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya [SK PUG](#)
2. Foto/Dokumentasi Kegiatan responsif gender Perangkat Daerah, Diberi Judul Di Atasnya
  - Kegiatan jemput bola pengaktifan IKD di Taman Bungkul.





- Kegiatan apel pagi setiap hari Senin.



- Kegiatan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan pancasila dan maklumat pelayanan, dan doa bersama setiap hari Selasa-Kamis.



- Kegiatan “Disdukcapil Belajar” setiap hari Kamis yang diikuti seluruh staf Disdukcapil Siola dan Kelurahan.



3. Bukti dukung inovasi penyelenggaraan PUG yang telah berdampak positif untuk Masyarakat yg dihasilkan selama 1 -2 tahun terakhir [INOVASI PELAYANAN DISDUKCAPIL](#)

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Dengan demikian, penyusunan “PROFIL PERANGKAT DAERAH RESPONSIF GENDER BERSINERGI DENGAN DAERAH RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK” ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat upaya pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di tingkat lokal. Melalui pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus, diharapkan profil ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengukur dan meningkatkan kinerja serta Responsivitas Gender Perangkat Daerah

Kami menyadari bahwa penyusunan profil ini merupakan awal dari sebuah perjalanan panjang menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak terkait untuk terus berkolaborasi dan berkontribusi dalam upaya menciptakan lingkungan yang Responsif Gender dan Sosial Inklusi serta lebih ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga profil PUG Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh Perangkat Daerah dan jejaringnya serta masyarakat secara luas dan mewujudkan Kota Surabaya yang Responsif Gender dan Sosial Inklusi sebagai Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak Tahun 2025